

REVITALISASI DIALEKTIKA PLURALITAS BUDAYA GLOBAL DALAM PERSPEKTIF POSKOLONIAL¹

Kasiyan

Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Rupa,
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Abstrak

Mendiskusikan perihal keberadaan kebudayaan bangsa kita di saat ini, dalam kaitannya dengan wacana kebudayaan global, kiranya salah satu *critical point* yang mendasar adalah pada segmentasi substansi kualitas keadilan dialektikanya dengan kebudayaan asing (Barat), yang selama ini timpang. Dalam artian, ketika *mainstream* dari pilihan arah orientasi pengembangan kebudayaan nasional, akhirnya jatuh pada komitmen untuk membuka diri, dengan mengadakan *sharing* seluas-luasnya dengan pluralitas budaya global, sebagaimana dipelopori oleh Sutan Takdir Alisyahbana dalam sejarah pemikiran dan polemik kebudayaan yang panjang di masa lalu, ternyata telah begitu jauh bersinggungan dengan sisi sensitif nasionalisme dan kejatidirian (*local wisdom*) kebudayaan nasional. Konklusi harapan besar dari komitmen terbukanya kita dengan peradaban dunia, demi kemungkinan kebudayaan kita mampu meng-“ada” secara bersama (*being together*) dalam format *equal plurality* yang sebenar-benarnya di antara semua bangsa, agar tercapai derajat kemanusiaan dan peradaban universal, ternyata tidak dapat termanifestasikan secara komprehensif. Betapa kita menyaksikan secara asertif transparan, bahwasanya selama ini terjadi paradigma ketidakadilan besar dalam dialektika kebudayaan yang dialami oleh bangsa kita dan juga bangsa-bangsa Timur lainnya dengan kebudayaan Barat, dalam semua sistem pranata kebudayaan yang ada, sehingga menimbulkan teriak keprihatinan di mana-mana. Dalam hal ini, kaukus problematikanya lebih disebabkan, oleh sikap Barat yang memaksakan dan melegitimasi posisi dirinya sebagai ordnat hegemoni bagi semesta kebudayaan dunia, yang dalam hal ini maknanya secara substansial, sebenarnya adalah tetap sebuah potret dari riwayat penjajahan baru, di era postkolonial.

Secara operasional objektif, Barat demikian teguh membangun wacana *imperium* universalitas peradaban hegemoniknya, dengan jalan mengembangkan paradigma oposisi biner yang absurd dalam dialektikanya dengan kebudayaan Timur. Absurditas itu secara tragik diderivasikan secara ideologis dan universal. Barat seolah-olah sebuah *elan*, yang

¹ Tulisan ini dimuat di Jurnal *HUMANIORA* Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (**Terrakreditasi Nasional**), Volume XV, No. 1/2003. Tulisan ini Dikembangkan dari Makalah yang Pernah Dipresentasikan di Universitas Atma Jaya Jakarta Indonesia, dalam rangka Simposium Internasional bertajuk *Relevansi Pemikiran Sutan Takdir Alisyahbana: Kini dan Masa Depan*, tanggal 30-31 Juli 2002.

mempunyai *previlase* untuk mempresentasikan Timur dalam kutub yang maknanya senantiasa berseberangan negatif dengannya, di antaranya dalam wujud justifikasi stereotipi konsepsi: pusat-marginal, progresif-dekadensi, *occident-orient*, normal-menyimpang. Namun yang lebih tragis adalah, ketika Timur, idiomatik terminologinya sebagai ‘bangsa korban’ tersebut, ternyata relatif belum disadari oleh bangsa Timur itu sendiri, dan bahkan justru kita *euphoria* wacana patologi kebudayaan diri, seperti: konsumerisme, pragmatisme, hedonisme, yang *notabene* hal itu adalah proyek dari ‘Mc Donalisasi peradaban’ oleh Barat. Pada diametrikal akademik di perguruan tinggi pun, ketika *booming* keilmuan baru seperti *culture studies*, dari simplifikasi pencermatan yang ada, ternyata tidak cukup berdaya, hanya untuk sekedar menghadirkan wacana ‘perlawanan’ terhadap proyek hegemoni dan ketidakadilan pluralistik dari dialektika kebudayaan Barat tersebut, dan justru kecenderungan imagenya adalah, justru semakin meneguhkan *illusi imanen* tentang stereotipe positif Barat, dengan jalan mengilmiangkannya, agar dapat dijadikan legitimasi diri, untuk kepentingan *euphoria* adopsi.

Oleh karena itu, dalam konteks ini, perspektif postkolonial sebagai salah satu wacana kajian yang relatif baru, akan segera menemukan relevansi kontekstualnya yang layak diderivasikan secara kritis, untuk kemungkinan dapat digunakan bagi kepentingan *discourse* upaya merivitalisasi paradigma dialektika kebudayaan Timur dan Barat, dalam perspektif makna yang lebih adil dan seimbang, pada masa mendatang. Perspektif postkolonial berupaya menimbang ulang, bahwa kebenaran peradaban itu sebenarnya bersifat universal, dan bukannya monopoli Barat seperti yang terjadi selama ini. Oleh karenanya diperlukan kearifan dialektika hibridasi-mutual semua bangsa, apalagi ketika secara realitas, di era peradaban global, persinggungan pluralitas kebudayaan menjadi *elan* keniscayaan. Hal ini demi *committed* bersama akan pencerahan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban universal yang relatif lebih *imparsial*.

Kata-kata kunci: revitalisasi, dialektika, pluralitas, budaya global, dan poskolonial.

Abstract

Discoursing our recently existing national culture in relation to global cultural discourses, one of the basic critical points is on the substantial segmentation of dialectic justice quality in compliance with foreign (western) cultures, which is so far unstable. It means that when the mainstream of directional choices in orienting the national cultural development, is finally put on the self-opening commitment established by extensive sharing concerning the global cultural plurality, as it was formerly initiated by Sutan Takdir Alisyabana revealing long historical thought and cultural polemics. It has ultimately gone along with the nationalism and local wisdom sensitivity of the national cultures. The high expectations concluded due to our opened commitment toward world civilization, for having our culture existed in the case of being together formatted by the truly equal plurality among nations to achieve the degrees of humanity and universal civilization, cannot be comprehensively manifested. It is assertively and transparently observable that a universal unfairness paradigm has happened in cultural dialectics of our nation and the other eastern ones in compliance with western culture, in all existing cultural institution,

so that concerns are yielded everywhere. In this case, the set of problems is mostly caused by westerns' attitudes forcing and legitimating their position as the hegemony ordinates of cultural universality of the world, which is substantially a portrait of new colonialism story, in the postcolonial are.

In terms of objective operational points of view, western people constantly build the imperial discourse of hegemonic civilization universality by developing binary opposing paradigms, which is absurd in eastern cultural dialectic consideration. The absurdity is tragically derived ideologically and universally. Western is assumed as if the one having privilege for representing the eastern in the pole having negatively controversial meaning, such as in terms of justification of stereotypes and concepts: marginal-center, progressive-decade, accident-orient, and normal-unstable. However, what is more tragic is that when the eastern people as the victimized nation either idiomatically and terminologically have not understood their position as they are. Whereas, they are made to be euphoria with the discourse of cultural pathology, such as: consumerism, pragmatism, and hedonism constituting the project of "the civilization McDonalized" the western establish. Considering the diametrical academics found in colleges, in new science booming like culture studies, form the existing simplified accuracy, it is actually not strong enough only for providing struggling discourse toward the hegemonic projects and pluralistic unfairness from the western cultural dialectics. And the images tend to more seriously confirm immanent illusion concerning western positive stereotypes by means of scientific ways to gain self legitimating, for the sake of adopting euphoria.

Hence, in this context, the postcolonial as one of relatively new studies, will immediately find contextual relevance, which are proper to be critically derived and to be used for discoursing needs in revitalizing the paradigm of western and eastern cultural dialectics, in more fair and balanced meaning perspectives for the future. The postcolonial perspectives attempt to reconsider that the civilization truth claim is universal and it is not as what the westerns recently monopolize. Therefore, it is required the mutual-hybridizing dialectical wisdom of all nations, beside, in the global civilization, the cultural plurality touch has been the certainty. This is committed for all in the purpose of enlightening humanistic values and universal civilization relatively impartial.

Key words: revitalization, dialectics, plurality, global culture, and postcolonial.

Pengantar

Mendiskusikan perihal entitas kebudayaan bangsa kita di saat ini, dalam kaitannya dengan wacana kebudayaan global, kiranya salah satu *critical point* yang mendasar adalah pada segmentasi substansi kualitas keberdayaan dan keadilan dialektikanya dengan kebudayaan asing (Barat), yang selama ini begitu dirasakan timpang. Dalam arti, ketika arus utama (*mainstream*) dari pilihan arah orientasi pengembangan kebudayaan nasional, akhirnya jatuh pada komitmen untuk membuka diri, dengan mengadakan *sharing* seluas-luasnya dengan pluralitas budaya global, sebagaimana dipelopori oleh Sutan Takdir

Alisyahbana pada dekade 30-an, dalam sejarah pemikiran dan polemik kebudayaan yang panjang di masa lalu, ternyata telah begitu jauh bersinggungan dengan sisi sensitif nasionalisme dan kejatidirian kebudayaan nasional.

Konklusi harapan besar dari komitmen terbukanya kita dengan peradaban dunia, demi kemungkinan kebudayaan kita mampu meng-‘ada’ secara bersama (*being together*) dalam format *equal plurality* yang sebenar-benarnya di antara semua bangsa, agar tercapai derajat kemanusiaan dan peradaban universal, ternyata tidak dapat termanifestasikan secara komprehensif. Betapa kita menyaksikan secara konkrit, bahwasanya selama ini telah terjadi paradigma ketidakadilan besar dalam dialektika kebudayaan yang dialami oleh bangsa kita dan juga bangsa-bangsa Timur lainnya dengan kebudayaan Barat, dalam semua sistem pranata kebudayaan yang ada, sehingga menimbulkan keprihatinan di mana-mana.

Dalam hal ini, kaukus problematikanya di antaranya lebih disebabkan: *pertama*, adalah sikap kita dalam memaknai eksistensi kebudayaan diri yang perlu direvitalisasi; dan *kedua*, sikap Barat yang telah demikian memaksakan dan melegitimasi posisi dirinya sebagai ordinar hegemoni bagi semesta kebudayaan dunia, yang dalam hal ini maknanya secara substansial, sebenarnya adalah tetap sebagai potret dari riwayat penjajahan baru, di era postkolonial. Dalam kaitannya dengan dua hal tersebut, makalah ini mencoba mengambil posisi.

Mengidealkan Kebudayaan sebagai Dimensi Kerja

Ketika kita berbicara tentang wacana keprihatinan dari dialektika kebudayaan kita dalam perspektif kebudayaan global, maka sebenarnya ada satu hal yang keberadaannya dipandang krusial dan sekaligus strategis, yakni diperlukannya upaya kritik ke dalam terhadap kebudayaan bangsa kita sendiri, yang di antaranya adalah berkaitan dengan bagaimana kecenderungan kita selama ini dalam memberikan pemaknaannya. Pemaknaan yang terdapat dalam kosa kata kebudayaan itu sebenarnya begitu kompleks, sebagaimana pernah dikemukakan oleh A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn dalam bukunya *Culture, a Critical Review of Concepts and Definitions*, bahwa ada sekitar 179 definisi tentang kebudayaan

(dalam Koentjaraningrat, 1987:9-10). Dari sekian banyak definisi tentang kebudayaan tersebut, sebenarnya pada dimensi tertentu, baik menyangkut benda (*artefact*), sikap mental (*mentefact*), maupun sistem sosial (*sociofact*) (Koentjaraningrat, 1987), dapat dikristalkan pemaknaannya menjadi dua kategori besar, yakni *pertama*, kebudayaan dimaknai sebagai dimensi 'kata benda' dan, *kedua* sebagai dimensi 'kata kerja'. Dua kristalisasi substansi pemaknaan kebudayaan tersebut, menghadirkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda, tidak saja secara idealitas konsepsional tetapi juga dalam penerjemahan praktisnya.

Yang menjadi persoalan kemudian adalah, dari dua kristalisasi dimensi pemaknaan kebudayaan tersebut, tampaknya yang terjadi dalam masyarakat dan bangsa kita, kecenderungan pilihan pemaknaannya adalah jatuh pada pilihan konsep kebudayaan sebagai dimensi 'kata benda'. Hal ini, juga sebagaimana pernah disinyalir dan dikritik keras oleh Jacob Oetama (pimpinan harian *Kompas*), ketika berlangsungnya *Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 1991* (1992:161).

Jika kebudayaan dimaknai dalam dimensi 'kata benda', maka kebudayaan itu dilihat semata-mata sebagai suatu yang *given*, atau *ascribed*, yang telah ada dan tersaji di depan mata, dan bukan sebagai sesuatu yang *achieved*, atau yang terus perlu ikhtiar dan pengupayaan. Dalam pandangan semacam itu, pertanyaan tentang kehadirannya, mengapa ia hadir, dan dalam bentuk apa ia hadir, lebih sering mendapatkan klarifikasi jawaban dalam satu sapuan besar kata-kata, seperti sejarah. Dalam pemahaman versi ini, kultur dianggap sebagai sesuatu yang sudah ada, sehingga persoalan yang tersisa hanyalah bagaimana ia dikembangkan, dikontrol, atau dijadikan suatu program, dan oleh karenanya keberadaannya menjadi sesuatu yang sangat programatik. Dalam istilah lain, kebudayaan yang demikian lebih diartikan sebagai *heritage*, warisan yang diterima, atau *beirloom*, warisan yang akan dilestarikan, direncanakan, atau *malah* diputuskan untuk diteruskan tanpa *reserve* apa pun.

Menurut Jacob Oetama (1992:161), kecenderungan kita untuk melihat kebudayaan sebagai warisan (*heritage*), seperti khasanah keendekiaan, adat istiadat, atau hal-hal lainnya, yang selalu dengan pikiran untuk diwariskan, diteruskan (*beirloom*) untuk

generasi berikutnya, bukanlah sesuatu yang keliru. Namun, kalau itu yang menjadi gairah kaukus pemikiran dan arus utama (*mainstream*) satu-satunya, maka kebudayaan sebetulnya agak dikuras maknanya menjadi semacam *the archaic heritage*. Kalau kutur dianggap sebagai *the archaic heritage*, tentu saja bukan saja sesuatu yang keliru di dalam dirinya. Namun, sikap yang menjunjung keyakinan kultur sebagai *the archaic heritage* itu, sangat rentan mengandung semangat yang sebetulnya ‘anti kultur’. Hal ini lebih disebabkan, karena di sana ada semacam *the sanctification of the heritage* (kesucian warisan budaya) yang menyebabkan ia menjadi anti perubahan, dan akhirnya masyarakat lebih obsesif memelihara *inertia*. Fenomena tersebut pada gilirannya akan menyebabkan warna kultur itu, berada dalam tahap *entrophy*, karena tidak memiliki kemampuan untuk berkembang, dan akhirnya menjadi kaku atau tidak lentur dalam menghadapi setiap dinamika perubahan yang tidak mungkin dapat terelakkan.

Hal yang sama, juga terjadi dalam pandangan kebudayaan sebagai *heirloom*, sesuatu yang sudah mempola, yang bukan saja ingin dilestarikan tetapi harus diwariskan. Hal ini berangkat dari spirit *the sanctification of the heirloom*, yakni suatu warisan yang dulu diperoleh, yang sekarang hidup adalah dianggap yang terbaik, yang tidak bisa tidak, harus diteruskan, diwariskan lagi. Sekali lagi, ini tidak keliru di dalam dirinya. Yang keliru adalah fenomena dan sikap tertutup itu, sehingga kebudayaan diartikan sebagai sesuatu yang sudah hadir, selesai, dan akhirnya *malah* kebudayaan adalah sesuatu yang dianggap objek, benda yang siap untuk diwariskan. Kebudayaan dalam arti ini adalah kebudayaan yang bermakna statis.

Hal tersebut akhirnya menimbulkan persoalan, ketika ternyata makna konsep pewarisan kebudayaan, baik pewarisan dari dan pewarisan ke generasi yang berbeda, tidak ada usaha, bukan saja untuk mencari tetapi juga mengolah dimensi lain dari kebudayaan dimaksud. Oleh karena itu, proses pewarisan kebudayaan tidak akan memiliki kepenuhan arti, jika sekiranya kita tidak sadar akan makna pewarisan kebudayaan itu, yang salah satu substansinya yakni untuk mampu menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang lebih manusiawi (*human social existence*).

Jika kebudayaan semata-mata dipandang dalam kecenderungan makna seperti tersebut, maka sebenarnya ada satu dimensi lain yang tidak pernah tergarap dan bahkan diterlantarkan, yakni makna kebudayaan sebagai ‘dimensi kerja’. Pemaknaan kebudayaan dalam dimensi ini, seyogyanya justru menjadi sesuatu yang diidealkan, karena di dalamnya terkandung semangat yang berbeda, yakni pengertian kultur bukan saja sesuatu yang *given* atau *gabe* (istilah Jerman), melainkan lebih sebagai *aufgabe*, *opdracht*, suatu tugas atau kerja yang harus dilaksanakan, diselesaikan untuk menjawab tantangan nyata suatu zaman, kini atau yang akan datang. Kebudayaan dalam arti yang terakhir inilah, mestinya kita bersama-sama mampu mencoba untuk membangun kesadaran dan mengambil posisi.

Fenomena Gegar Budaya

Berkaitan dengan problem kecenderungan warna ekspresi kebudayaan bangsa kita selama ini, maka manakala kita simakcermati secara jernih di era ini, sebenarnya dalam kebudayaan bangsa kita, tengah dan bahkan terus akan berproses dalam format fenomena yang mungkin dapat disebut sebagai ‘gegar budaya’. Banyak indikator yang tersaji di keseharian masyarakat kita, yang segera dapat digunakan untuk menjelaskan dan memverifikasinya. Betapa dalam kesadaran empiris keseharian kita, teriak keprihatinan di mana-mana dalam hampir semua bidang kehidupan, yang kemudian dapat dirangkum dalam satu ungkapan krisis multidimensional, sampai hari ini tidak pernah mengisyaratkan tanda-tanda akan segera selesai. Memang benar, bahwasannya persoalan yang ada adalah relatif *complicated*, namun dalam perspektif kebudayaan yang lebih luas, tentunya hal tersebut juga mengindikasikan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang salah dalam proses berkebudayaan kita selama ini, sehingga berimplikasi pada warna kecarutmarutan persoalan bangsa kita menjadi semakin buram dan tidak kunjung selesai.

Dalam konteks ini, pertanyaan tentang “Ada apa sebenarnya dengan kebudayaan kita?” tentunya layak untuk dikemukakan. Kemungkinan jawaban terhadap pertanyaan tersebut salah satunya adalah, fenomena tersebut tanpa disadari (*unconscious*) lebih disebabkan oleh kenyataan kecenderungan pemaknaan kebudayaan kita selama ini, dalam

pengertiannya sebagai 'kata benda', dan bukannya sebagai dimensi 'kata kerja'. Pemaknaan tersebut, secara implementatif akan menghadirkan implikasi yang absurd, di antaranya adalah kebudayaan kita akhirnya tampak kering dari spirit nilai-nilai untuk senantiasa mampu mengkreasi kultur secara produktif, sehingga menghasilkan serangkaian *invention*, yang lebih reflektif dengan jiwa zaman (*Zeitgeist*) yang ada.

Hal ini yang menyebabkan kebudayaan kita menjadi relatif *stagnant* serta kering eksistensinya. Bukankah sebenarnya pada saat ini kebudayaan kita tengah berada pada salah satu fase kekosongan (*blank*) dalam fase sejarah kebudayaan. Yakni sebenarnya kita belum pernah mengalami yang dinamakan dengan fase modernitas kebudayaan dengan atribusi di antaranya adalah revolusi teknologi dan informasi, sebagaimana yang terjadi di Barat. Hal ini jika kita menggunakan pemaknaan terhadap *term* modernitas itu, diletakkan dalam substansinya sebagai sikap mental budaya yang dimiliki oleh suatu bangsa. Kebudayaan kita sampai saat ini masih kental berada pada sebuah fase feodal agraris, dan kalau pun kita mempunyai kemudahan akses terhadap serangkaian teknologi dan informasi sebagai supremasi *elan* modernitas di saat ini, hal itu maknanya hanya sebatas terjadi pada ranah yang sangat artifisial, yakni sebatas sebagai konsumen, dan oleh karenanya pula pada titik kritis ini, eksistensi kebudayaan kita menjadi amat rentan terhadap terminologi korban.

Fenomena ketidakberdayaan dialektika budaya kita dalam konteks sebagaimana disebutkan di atas, dan indikator di antaranya adalah menjelma dalam bentuk krisis multidimensional, sebenarnya Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menderita. Namun, di antara sekian banyak bangsa Timur yang bermasalah dalam kebudayaannya dalam arti yang luas, Indonesia menempati urutan yang relatif terbawah, terutama dalam hal berkaitan dengan problem nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan universal. Bahkan akibat terlalu patologisnya carut-marut eksistensi kebudayaan bangsa kita di saat ini, dengan tiadanya isyarat yang cukup signifikan bagi pencerahannya, sebenarnya bangsa dan kebudayaan Indonesia kini, pada dimensi tertentu dapat dimaknai sedang menjalani sebuah proses tesis 'evolusi Darwin terbalik', yakni secara bersama-sama kita sedang

berproses untuk menjadi kera, dan bukannya menjadi manusia yang semakin tinggi derajat harkat insaninya.

Absurditas Proyek Pemberadaban Barat

Problematika patologis dari eksistensi kebudayaan bangsa kita, yang salah satu kritik internalnya disebabkan oleh adanya sesuatu yang salah dalam pemaknaan kebudayaan diri selama ini, yakni lebih berdimensikan makna sebagai 'kata benda' tersebut, pada sisi yang lain juga semakin diperparah dengan adanya sebuah era penjajahan baru dalam kebudayaan, oleh Barat. Ketika pada medio abad ke-20 dan di sepertiga sesudahnya, pada waktu kolonialisme fisik di semua negara berkembang rontok satu per satu, ternyata era kolonialisme oleh Barat secara substantif tidak secara serta merta hilang dari kamar peradaban.

Dalam pandangan Gandhi (2001:24), kolonialisme tidaklah berakhir dengan berakhirnya pendudukan kolonial. Saat ini, penggelaran operasi kekuasaan tersebut telah berganti baju, tidak hanya sebatas pada pengendalian sarana dan sistem reproduksi material, tetapi bekerja lebih canggih, yakni dalam ranah mental dan terjadi pada segala sistem pranata kebudayaan yang ada, yakni pada wilayah determinan kultural-ideologis. Fenomena inilah, yang diistilahkan oleh Antonio Gramsci sebagai konsep 'hegemoni'.

Istilah 'hegemoni' secara etimologis berasal dari bahasa Italia *egemonia/egemon*, yang artinya pemimpin atau penguasa, yang konotasi maknanya adalah berkaitan dengan kehadiran kekuasaan. Gramsci memandang tema 'hegemoni' dalam konteks pelaksanaan kekuasaan, di mana kekuasaan yang dominan (dalam sejarah pemikiran politik dari Machiavelli sampai Pareto) muncul dalam dua wajah, yakni lewat *coercion* (atau penindasan dengan kekerasan senjata atau intimidasi tangan besi) di satu pihak. Di lain pihak, kekuasaan yang dominan tampil dalam wajah dominasi (penguasaan) intelektual dan moral. Artinya, dipakailah cara-cara kultural, intelektual yang canggih untuk menaklukkan kesadaran kritis masyarakat yang dikuasai, sehingga semuanya dikontrol dalam pembisuan penyeragaman basis-basis keyakinan dan persepsi monolitik mengenai kebenaran (Mudji Sutrisno, 1994:60).

Dalam konteks yang kedua inilah, Gramsci meletakkan pengertian ‘hegemoni’ itu. Batasan hegemoni yang diberikan oleh Gramsci ini, menurut Femia dalam bukunya *Gramsci’s Political Thought: Hegemony, Consciousness, and The Revolutionary Process* (1981:31-32) bertolak dari pemikiran Marx dan Engels dalam buku mereka *The German Ideology*, yang menyatakan bahwa: “*In every epoch the ideas of the ruling class are the ruling ideas, the class that is the ruling material power of society is at the same time is ruling intellectual power*”. Adapun salah satu ciri yang menandai realitas yang hegemonik adalah, bahwa kesadaran sosial tampil dalam bentuk ‘*contradictory of consciousness*’ (kesadaran yang bertentangan). Dengan demikian, ketika realitas dialektika kebudayaan global nuansanya sarat dengan makna ketidakadilan terutama bagi kebudayaan Timur, maka dalam istilah yang lain, kita sebenarnya sekarang tengah berada pada era penjajahan baru sesudah masa kolonialisme fisik, yakni ‘era poskolonial’.

Dengan demikian, hegemoni yang dikonsepsikan Barat, beroperasi pada ranah kesadaran dan representasi. Kesuksesannya terletak pada berjalannya seluruh pengalaman sosial, kebudayaan, dan individu pada sirkulasi dan pola kekuasaan yang berlaku. Hegemoni telah menaturalisasi apa yang secara historis dinamakan ideologi kelas dan membawanya dalam bentuk-bentuk yang bersifat *common sense*, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang natural. Dalam konteks ini, akhirnya negara-negara bekas jajahan Barat (negara-negara Timur) menjadi sebetuk panggung yang didirikan di hadapan Barat. Di sinilah repertoar budaya dikukuhkan, imajinasi Eropa (dan juga Amerika) dibangun dengan serangkaian oposisi binernya, yakni Barat adalah prototipe dari kebudayaan yang maju, pintar dan superior, sedangkan Timur adalah terbelakang, bodoh, inferior, dan bahkan menjijikkan (Dahlan, 2001:8).

Di sinilah secara realistis, Barat demikian teguh membangun wacana *imperium* universalitas peradaban hegemoniknya, dengan jalan mengembangkan paradigma oposisi biner yang absurd dalam dialektikanya dengan kebudayaan Timur. Absurditas itu secara memperhatikan diderivasikan secara ideologis dan universal. Barat seolah-olah sebuah *elan*, yang mempunyai hak dan kewenangan penuh untuk memproduksi makna dan mempresentasikan Timur dalam kutub yang maknanya senantiasa berseberangan negatif

dengannya, di antaranya dalam wujud justifikasi stereotipe konsepsi: pusat-marginal, progresif-dekaden, *orient-occident*, normal-menyimpang (Pilliang, 1998).

Pola-pola penghegemonian lewat kesadaran, representasi bahasa, dan manipulasi secara ideologis tersebut, juga tampak dari pemberian label atau sebutan Barat terhadap Timur, yakni seperti: ‘Timur Jauh’, ‘India’, ‘eksotik’, ‘non Barat’, ‘pribumi’, ‘lokal’, ‘asing bagi Barat’, merupakan konotasi-konotasi representasi bahasa yang tidak menguntungkan, karena dibentuk dari cermin Barat. Sebutan ‘Timur jauh’ misalnya, ‘jauh’ yang dimaksud tak lain adalah jarak yang terukur dari Barat (Eropa). Jadi representasi bahasa itu telah memperkokoh illusi, bahwa arus utama sejarah-sejarah dunia dipresentasikan dan mengalir melalui Eropa (Hodgson, dalam Dahlan, 2001:9).

Dalam konteks inilah, karena Barat memiliki *power* atau kekuasaan, kemudian mengklaim dirinya sebagai satu-satunya sumber kebenaran (*truth claim*) universalitas peradaban. Dalam kasus ini, akhirnya dapatlah diurai sebuah simpul, yakni bahwa yang dinamakan sebuah kebenaran dalam kebudayaan itu sifatnya tidak alami atau natural, melainkan senantiasa terkait dengan variabel kekuasaan.

Hal ini sejalan dengan pandangannya Michel Foucault dalam karyanya *The Archeology of Knowledge*, yang kemudian dipertajam lagi dalam bukunya *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writing 1972-1977*, yakni bahwasannya kebenaran pengetahuan adalah sebuah rezim yang akan senantiasa berkaitan dengan *power* atau kekuasaan. Dengan demikian, makna kebenaran harus dipahami sebagai suatu sistem prosedur-prosedur untuk mengatur produksi, regulasi, distribusi, dan operasi pernyataan-pernyataan. Kebenaran selalu terhubung, dan ada di dalam relasi dengan sistem-sistem yang menghasilkan dan mempertahankannya (Foucault, 2002). Singkatnya, Foucault sebenarnya ingin menegaskan bahwa kebenaran itu tidak terletak di luar, tetapi di dalam kuasa. Kebenaran, tiada lain adalah relasi antar sistem itu sendiri. Ia adalah mekanisme aturan-aturan (*rules*), yang oleh kesadaran kita sudah dianggap pasti dan benar, untuk menentukan, memilah-milah, dan mengklasifikasi kedirian kita.

Kolonialisme modern, dengan demikian telah membentuk kekerasan yang lain, dengan melembagakan hierarkhi atas subjek-subjek dan pengetahuan yang abadi, yakni:

‘penjajah dan terjajah’, ‘Barat dan Timur’, ‘beradab dan primitif’, ‘ilmiah dan tahyul’, ‘maju dan berkembang’. Dampak dari peneguhan skematik ini adalah, yang terjajah harus dipostulatkan sebagai citra yang terbalik negatif dari penjajah. Agar Eropa muncul sebagai satu-satunya sumber kebenaran, maka dunia si terjajah harus dikosongkan dari makna.

Oleh karena itu, secara sederhana kolonialisme menandai proses historis dalam hal ini, Barat berusaha secara sistematis untuk menghancurkan atau menafikan perbedaan dan nilai-nilai dari bangsa non Barat (Praskhas, dalam Gandhi, 2001:21-22). Oleh karena itu pula, apa pun ekspresi Barat terhadap Timur, akhirnya tetap dianggap sebagai sesuatu hal yang senantiasa positif maknanya. Hal ini di antaranya dapat digambarkan dari satu ungkapan berikut: “Apa pun yang mungkin pernah menjadi kejahatan Inggris di masa lalu misalnya, ia (Barat) tetap berdalih, bahwasannya hal tersebut merupakan alat sejarah yang secara tidak sadar telah meningkatkan Timur dari negara semi bar-bar menjadi kondisi modern yang maju” (Edward W. Said, 1994).

Namun, yang lebih tragis adalah, ketika budaya bangsa Timur yang kecenderungan maknanya sebagai korban tersebut, ternyata relatif belum disadari oleh kebanyakan bangsa Timur itu sendiri. Bahkan justru kecenderungannya kita semakin tampak larut dan tenggelam dalam *euphoria* wacana seperti: konsumerisme, pragmatisme, hedonisme, yang *notabene* hal itu sebenarnya adalah roh dari proyek ‘Mc-Donaldisasi peradaban’ Barat (meminjam istilahnya George Ritzer, sosiolog dari Universitas Maryland).

Pada dimensi yang lain, misalnya yakni pada kajian akademik di perguruan tinggi pun, ketika *booming* keilmuan baru seperti *culture studies*, berdasarkan pencermatan terhadap substansinya, ternyata relatif tidak cukup efektif untuk menghadirkan wacana perlawanan atau budaya tandingan (*counter culture*) terhadap proyek hegemoni dan ketidakadilan dialektika dari kebudayaan Barat tersebut. Bahkan tampaknya kecenderungan *image*-nya adalah, orientasi dari kajian-kajian yang ada justru semakin meneguhkan *culture schizophrenia* (meminjam istilahnya Gilles Deleuze dan Felix Guattary), atau apa yang oleh Jean-Paul Sartre (2000) diistilahkan sebagai *ilusi imanen*,

yakni adanya kecenderungan meyakini stereotipe budaya Barat yang selalu dianggap positif, kemudian diilmiahkannya agar dapat dijadikan legitimasi diri untuk kepentingan *euphoria* mengadopsinya.

Perspektif Studi Poskolonial: Perayaan Kesadaran Perbedaan

Perspektif poskolonial sebagai salah satu wacana kajian yang relatif baru, dengan demikian merupakan salah satu analisis kritis, untuk kemungkinan dapat digunakan bagi kepentingan *discourse* bagi upaya merevitalisasi paradigma dialektika kebudayaan Timur dan Barat, dalam perspektif makna yang lebih adil dan seimbang, pada masa mendatang. Perspektif poskolonial menegaskan pentingnya untuk menimbang ulang paradigma tentang klaim kebenaran peradaban, yang lebih sesuai dengan jiwa zaman (*Zeitgeist*), yakni bahwasannya kebenaran peradaban itu sebenarnya bersifat universal, ia dapat terserak di mana-mana, dan bukannya monopoli Barat seperti yang terjadi selama ini.

Dalam konteks inilah, sudah seyogyanya kita membangun pendekatan atau paradigma baru, yakni sudah saatnya ‘merayakan kesadaran perbedaan’, menggantikan paradigma oposisi biner hegemonis yang selama ini menjadi keniscayaan keyakinan. Penguhan konsep antara pusat (*central*) dan pinggiran (*peripheral*), sebagaimana yang telah dihegemonikan oleh Barat selama ini, sudah seharusnya kita fosilkan dalam bingkai kesadaran kultural, sehingga idealisasi akan eksistensi pluralistik budaya dalam semangat untuk mencoba meng-‘ada’ secara bersama (*being together*) di antara semua kebudayaan dunia akan dapat direalisasikan secara lebih nyata.

Adapun salah satu titik strategis bagi kepentingan perubahan tersebut, yakni dengan jalan mengubah kaukus paradigmanya. Pentingnya ‘peran paradigma’ bagi kepentingan penggagasan setiap perubahan, sebagaimana pernah ditegaskan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolution* (1970). Menurutnya, dalam setiap penggagasan perubahan apapun, termasuk juga perubahan dalam konteks ilmu pengetahuan dan kebudayaan, tidak akan pernah terjadi secara substansial, manakala tidak disertai oleh perubahan paradigma yang mengkonstruksinya.

Wacana poskolonialisme, yang sejak perkembangannya pada tahun 1980-an, sering digolongkan dalam kategori ilmu kemanusiaan baru, paradigma baru yang menyertainya lebih diarahkan pada kritik dan kajian pada hegemoni kultural ilmu-ilmu dan kebudayaan Barat, dalam usahanya untuk menuntut kembali nilai epistemologis dan perantara dari dunia non-Barat (Gandhi, 1994:57-58). Poskolonialisme bahkan dianggap dapat menjadi salah satu pemikiran terbaik dalam kritik sejarah (Robert Young, dalam Gandhi, 2001:225). Sebagaimana dipahami selama ini bahwa sejarah peradaban adalah wacana, yang dengan itu Barat telah meneguhkan hegemoninya atas sebagian dunia (Gandhi, 2001:226). Perspektif poskolonial semakin menemukan makna sebagai alternatif suluh penerang bagi kemungkinan pengkajian yang lebih luas tentang ketidakadilan dialektika kebudayaan Timur-Barat, di antaranya banyak diilhami oleh munculnya beberapa karya monumental, misalnya buku-buku seperti: *Orientalisme* (Edward W. Said), *Oksidentalisme* (Hassan Hanafi), *Postcolonial Theory: A Critical Introduction* (Leela Gandy).

Namun demikian, di samping perspektif poskolonial berupaya untuk menggugat dan mengadakan perlawanan terhadap paradigma hegemoni klasik Barat atas Timur sebagaimana yang terjadi selama ini, pada sisi yang lain juga mengandaikan adanya interpretasi yang lebih terbuka terhadap pemaknaan spirit dan nilai-nilai kebudayaan diri (nasionalisme) yang sempit, ketika secara realitas di era globalisasi ini, tidak mungkin ada satu pun bangsa di dunia yang dapat hidup sendiri dalam bingkai isolasi. Hal tersebut, kiranya paralel dengan apa yang pernah ditegaskan oleh Umar Kayam (1992:438), berkaitan dengan problem kebudayaan dan kebangsaan, yakni bahwasannya yang dinamakan kebudayaan dan kebangsaan sebenarnya adalah konsep yang terbuka. Adalah penting untuk membayangkan transformasi baru kesadaran sosial yang lebih besar *ketimbang* identitas dan batas-batas yang kaku yang dikehendaki oleh kesadaran nasional.

Hal ini disebabkan, kecenderungan nostalgia terhadap nasionalisme kebudayaan diri yang dikunyah secara berlebihan akan sangat membahayakan. Selain akan menumpulkan kesadaran kritis, romantisme yang berlebihan dan sempit akan cenderung berpotensi melepaskan (tanggung jawab) diri dari tugas yang seharusnya diemban dalam

kolase kehidupan dan kebudayaan di depan yang masih teramat panjang. Idealnya, kesadaran kebudayaan nasional seharusnya membuka jalan bagi timbulnya komunikasi global yang tercerahkan secara politis dan etis. Dengan kata lain, poskolonialisme juga memfasilitasi bagi potensi timbulnya suatu posnasionalisme yang tercerahkan, untuk menghasilkan ‘manusia pascanasional’ (meminjam istilahnya YB Manguwijaya). Dalam istilahnya Gandhi (2001:165), bahwasannya kesadaran akan kebudayaan diri, bukan berarti menutup pintu komunikasi.

Dengan demikian, dalam era globalisasi ini realitas kebudayaan semua bangsa di dunia seringkali menghadapi serangkaian kondisi potensi ketidakstabilan. Dalam menghadapi realitas ketidakstabilan budaya, menurut Homi Bhabha (1994), memaksa kita untuk tidak memikirkan kebudayaan dan identitas sebagai entitas yang bersifat tetap, tetapi selalu berubah. Oleh karena itu, yang sangat diperlukan semua bangsa adalah pengembangan wacana dialektika budaya antar bangsa yang positif, yang salah satunya adalah dapat ditempuh dengan jalan menerjemahkan konsep *hibridasi-mutual* semua budaya bangsa. Apalagi ketika secara realistis, di era peradaban global, persinggungan pluralitas kebudayaan menjadi *elan* keniscayaan. Ide tentang ketidakstabilan budaya dan identitas dalam globalisasi ini, akhirnya membawa kita kepada pemahaman bahwa kebudayaan dan identitas selalu merupakan pertemuan dan percampuran berbagai kebudayaan dan identitas yang berbeda-beda. Inilah yang disebut hibriditas kebudayaan dan identitas. Batas-batas kebudayaan yang mapan dikaburkan dan dibuat tidak stabil oleh *hibridasi*.

Konsep *hibridasi* ini maknanya adalah mirip dengan konsep *mimikri* oleh Homi Bhabha (1994), ketika berhadapan dengan pluralitas budaya global. Konsep *mimikri* akan memberikan cara berpikir alternatif, seperti halnya tidak menunjukkan ketergantungan sang terjajah kepada yang dijajah, ketergantungan kulit berwarna kepada kulit putih misalnya, tetapi dalam konteks ini, peniru menikmati atau bermain dengan ambivalensi yang terjadi dalam proses imitasi. Ini terjadi karena *mimikri* selalu mengindikasikan makna yang “tidak tepat” dan ‘salah tempat’, ia imitasi sekaligus ‘subversi’. Dengan begitu, *mimikri* bisa dipandang sebagai strategi menghadapi dominasi. Seperti penyamaran, ia

bersifat *ambivalen*, melanggengkan tetapi sekaligus menegaskan dominasinya. Inilah dasar sebuah identitas hibrida.

Pentingnya akan alternatif *hibridasi-mutual* ini, yakni untuk menghindari kemungkinan terjadinya ketidakadilan dialektika kebudayaan secara universal, berdasarkan prinsip saling ketergantungan (*interdeppendency*). Pada dimensi lain yang maknanya lebih jauh, konsep hibridasi-mutual dari semua kebudayaan tersebut kiranya dapat mencegah kemungkinan terjadinya petaka benturan antarperadaban yang dahsyat di dunia, yang lebih disebabkan oleh ketimpangan dialektika terhadap pluralitas kebudayaan global, sebagaimana pernah digambarkan secara sangat provokatif oleh Samuel P. Huntington, dalam bukunya *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order* (1996), dan juga demi *committed* bersama akan pencerahan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban universal yang relatif lebih *impartial*.

Kenyataan pilihan penyelesaian dialektika kebudayaan plural, dengan mengandaikan jalan tengah tersebut, diharapkan relatif tidak menghadirkan apa yang dinamakan dengan kecenderungan logika *dogmatik* maupun logika *agnostik*, sebagaimana lazimnya manakala kita dihadapkan pada setiap diskursus perihal dinamika konflik yang akan senantiasa menyertai di setiap perubahan dan pembaharuan budaya. Sering kali kecenderungan *dogmatik* hanya akan melahirkan sikap otoriter secara intelektual, yang memaksa pihak lain untuk harus menerima kepastian atau bentuk-bentuk penyelesaian kebudayaan yang sudah disiapkan. Hal ini akan membawa orang pada pemaksaan secara moral.

Pada sisi yang lain, sikap *agnostik* hanya akan membawa orang kepada “pragmatisme intelektual”, yang akan membawa kita pada oportunisme secara moral (Ignas Kleden, dalam Goenawan Mohamad, 1996:xiii-xv). Namun demikian, ada persamaan yang menarik antara kecenderungan *dogmatik* dan kecenderungan *agnostik*, yakni bahwasannya apa yang dinamakan penyelesaian masalah pada akhirnya bukan berada *absolut* di tangan manusia, tetapi dalam ‘kekuasaan waktu’.

Dengan demikian mengatasi dilema, apalagi berkaitan dengan wilayah kebudayaan yang kompleks adalah bukan pekerjaan yang akan pernah tuntas. Hal ini

disebabkan dalam kenyataannya, yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, yakni bahwa penyelesaian suatu dilema akan senantiasa melahirkan dilema baru dalam suatu rangkaian dialektis yang tiada pernah putus-putusnya. Oleh karena itu, pilihan orientasi pengembangan kebudayaan kita dengan menentukan komitmen untuk senantiasa membuka diri terhadap kebudayaan Barat sebagaimana telah dipelopori oleh Sutan Takdir Alisyahbana, dalam sejarah polemik kebudayaan kita pada masa lalu, sangat perlu disertai upaya pemberdayaan ke dalam.

Demikianlah beberapa hal mendasar manakala mendiskusikan perihal entitas kebudayaan diri di tengah-tengah dialektikanya dengan pluralitas kebudayaan global. Pokok-pokok pikiran ini kiranya dapat dijadikan sekedar renungan dan pemantik bagi kemungkinan untuk selalu ‘mensubversi’ kesadaran diri secara kolektif, demi kemungkinan hadirnya serangkaian mediasi diskursif dialektika pluralitas budaya untuk menggali oasis yang lebih luas, dalam, dan jernih.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhabha, Homi K. 1994. *The Location of Culture*. London and New York: Routledge.
- Dahlan, Muhidin M. 2001 *Poskolonial: Sikap Kita terhadap Imperialisme*. Yogyakarta: Jendela.
- Femia Joseph V. 1981. *Gramsci's Political Thought: Hegemony, Consciousness, and The Revolutionary Process*. Oxford: Clarendon Press.
- Foucault, Michel. 2002. *Arkeologi Pengetahuan*, terjemahan Mochtar Zoerni. Yogyakarta: Qalam.
- Gandhi, Leela. 2001. *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*, terjemahan Yuwan Wahyutri dan Nur Hamidah. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Hanafi, Hassan. 2000. *Oksidentalisme: Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat*, terjemahan M. Najib Buchori. Jakarta: Paramadina.
- Huntington, Samuel P. 2002. *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia*, cetakan ketiga, terjemahan M. Sadat Ismail. Yogyakarta: Qalam.
- Kayam, Umar. 1992. "Kebudayaan Nasional, Kebudayaan Baru", dalam *Kongres Kebudayaan 1991: Kebudayaan Nasional Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya.
- Kleden, Ignas. 1996. "Eksperimen Seorang Penyair", dalam Goenawan Mohamad, *Catatan Pinggir 2*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Koentjaraningrat. 1987. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Kuhn, Thomas. 2001. *Peran Paradigma dalam Revolusi Science*, terjemahan Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Oetama, Jacob. 1992. "Industri Media sebagai Pengembangan Kebudayaan", dalam *Kongres Kebudayaan 1991: Kebudayaan Nasional Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya.

- Piliang, Yasraf Amir. 1999. *Sebuah Dunia yang Dilipat: Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme*. Bandung: Mizan.
- Said, Edward W. 1994. *Orientalisme*, terjemahan Asep Hikmat. Bandung: Pustaka.
- Sartre, Jean-Paul. 2000. *Psikologi Imajinasi*, terjemahan Silvester G. Syukur. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Sutrisno, Mudji. 1994. "Hegemoni?" dalam *Langkah-langkah Peradaban* Yogyakarta: Kanisius.

BIODATA PENULIS

Kasiyan, lahir di Ponorogo, 5 Juni 1968. Lulus sarjana Pendidikan Seni Rupa IKIP Malang (Sekarang Universitas Negeri Malang) tahun 1995. Menjadi dosen di Jurusan Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Yogyakarta sejak tahun 1999. Pernah berpengalaman mempresentasikan makalah di Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PUSPITEK LIPI) Jakarta, berjudul: *Analisis Gender pada Gambar Ilustrasi Buku Teks Sekolah Dasar Kurikulum 1994*, dalam rangka *Final Pemilihan Peneliti Muda Indonesia ke-VIII tahun 1999* (8-11 Oktober 1999). Pengalaman sebagai pemakalah Seminar Nasional 2 tahun terakhir, di antaranya yakni: 1) Sebagai pemakalah pada *Seminar Nasional Potret Perempuan Abad XXI*, dengan tema *Pemberdayaan Peran Perempuan dalam Iklan*, di Universitas Kristen Petra Surabaya (21 April 2001), sekaligus sebagai salah seorang kontributor tulisan, untuk buku yang dipersembahkan kepada Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, berjudul: *Perempuan dan Iklan: Sebuah Catatan Patologi Ideologi Gender di Era Kapital* (Fakultas Seni dan Desain Universitas Kristen Petra Surabaya, April 2001); 2) Sebagai pemakalah pada *Seminar Nasional Strategi Penerbitan Jurnal Seni dan Desain Terakreditasi*, di Universitas Negeri Malang, berjudul: *Revitalisasi Stereotipe-stereotipe Keilmuan Seni di Perguruan Tinggi* (22-23 Juni 2001); 3) Sebagai pemakalah pada *Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Seni dalam Perspektif Pluralisme Budaya*, di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, berjudul: *Pengembangan Paradigma Pendidikan Pemanusiaan Melalui Pendidikan Seni* (29-30 Oktober 2001); 4) Sebagai pemakalah pada Seminar Nasional Budaya bertajuk *Perspektif Poskolonial dan Posmodernisme dalam Kajian Seni dan Budaya*, di Program Studi Kajian Budaya, Program Pascasarjana, Universitas Udayana Denpasar Bali (22 Juni 2002); Selain menulis makalah untuk seminar, juga aktif menulis artikel yang dimuat di berbagai majalah dan jurnal ilmiah. Saat ini sedang menempuh studi S2, di Program Studi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Rupa, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Alamat e-mail: kasiyan1@yahoo.com.